

**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA BELANJA PADA LAPORAN
REALISASI ANGGARAN BELANJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI
SUMATERA BARAT**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

ERİYANDI SUKMA WILOGA

NIM. 57934

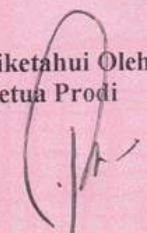
**PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIII
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA BELANJA PADA LAPORAN
REALISASI ANGGARAN BELANJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI
SUMATERA BARAT**

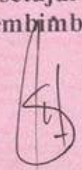
Nama : Eriyandi Sukma Wiloga
NIM : 57934
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Diketahui Oleh
Ketua Prodi


Perengki Susanto SE, M.Sc
NIP. 19810404 200501 1 002

Padang, Februari 2014

Disetujui Oleh
Pembimbing


Salma Taqwa, SE, M.Si
NIP. 19730723 200604 2 001

PENGESAHAN TUGAS AKHIR


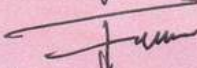
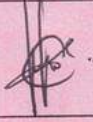
**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA BELANJA PADA LAPORAN
REALISASI ANGGARAN BELANJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI
SUMATERA BARAT**

Nama : Eriyandi Sukma Wiloga
NIM : 57934
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program
Studi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Februari 2014

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Salma Taqwa,SE,M,Si	(Ketua) 
2. Fefri Indra Arza,SE,M.Si,Ak	(Anggota) 
3. Charoline Cheisviyanny,SE,M.Ak,Ak (Anggota)	

ABSTRAK

Eriyandi Sukma Wiloga : Analisis Pengukuran Kinerja Belanja Pada Laporan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Pembimbing : Salma Taqwa, SE. M.Si

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis selisih antara belanja dan anggaran serta mengetahui bagaimana peningkatan kinerja anggaran belanja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan buku-buku serta peraturan perundangan yang mengatur tentang Realisasi anggaran belanja daerah.

Data yang digunakan dalam menganalisis adalah Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2010 sampai dengan 2012. Teknis analisis yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis belanja yang meliputi analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja, analisis efisiensi belanja.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa : 1). Pada analisis varians terdapat selisih belanja dengan realisasi, yang mana anggaran belanja yang terserap sebesar 88,75% dari APBD 2). Pada analisis pertumbuhan belanja tahun 2010 tingkat pertumbuhan belanja sebesar 0,034%, tahun 2011 sebesar 0,159% dan sebesar 0,165% untuk tahun 2012. rasio pertumbuhan belanja sebesar 0,119%. 3) Pada tahun 2010-2012 analisis keserasian belanja operasi dan belanja modal dinas Kehutanan menunjukkan rasio sebesar 0,953% untuk belanja operasi, dan 0,048% untuk belanja modal. 4) Pada tahun 2010-2012 realisasi belanja pada analisis efisiensi belanja Dinas Kehutanan adalah 86%. Hal ini menunjukkan adanya produktifitas dan efektifitas belanja daerah yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2010-2012.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *alamiin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan Judul **“Analisis Pengukuran Kinerja Belanja Pada Laporan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat”**. Dan Shalawat beriring salam tidak lupa penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Ibuk Salma Taqwa, SE. M.Si sebagai pembimbing Tugas Akhir yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan, dalam berbagai hal terutama dalam penyusunan Tugas Akhir ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Bapak Prof. Yunia Wardi, M.Si
3. Bapak Perengki Susanto, SE, M.Si, selaku Ketua Prodi D3 Fakultas Ekonomi

4. Ibuk Yopi Yori, SE. M.Si yang telah memberikan kesempatan dan membantu penulis untuk memperoleh data untuk menyusun Tugas Akhir ini.
5. Ibuk Charoline Cheisviyanny, SE, M.Si, Ak dan Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak sebagai penguji, yang telah bersedia menjadi penguji, memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan tugas akhir ini
6. Ibuk Salma Taqwa, SE. M.Si sebagai Pembimbing Akademik penulis.
7. Teristimewa penulis ucapkan kepada Ayahanda Zayuardi dan Ibunda Erni Susanti yang sangat penulis cintai dan hormati, yang telah memberikan dorongan moril maupun materil, serta adik-adik tercinta yang tak bosan-bosannya memberikan do'a.
8. Bapak dan Ibu dosen Staf pengajar dan Karyawan program studi DIII FE UNP yang telah membimbing dan berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis selama diperkuliahan.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penulisan Tugas Akhir.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi sempurnanya Tugas Akhir ini, dan penulis berharap semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi pembaca khususnya penulis.

Padang, Maret 2014

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Laporan Realisasi Anggaran.....	7
1. Pengertian Laporan Realisasi Anggaran	8
2. Isi Laporan Realisasi Anggaran.....	9
3. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran	10
4. Manfaat Laporan Realisasi Anggaran	10
5. Struktur Laporan Realisasi Anggaran	11
6. Periode Pelaporan.....	12
7. Informasi yang Disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran	12
B. Klasifikasi Laporan Keuangan menurut PSAP Nomor 71 Tahun 2010.....	12
1. Pendapatan.....	12
2. Belanja.....	14
3. Pembiayaan.....	21
C. Pengukuran Kinerja.....	22
1. Penilaian Kinerja	24
2. Tujuan Penilaian Kinerja	25
3. Aspek-aspek Pengukuran Kinerja	26
4. Sistem Manajemen Kinerja Sektor Publik	27
5. Pelaporan Kinerja	28

6. Evaluasi Kinerja	29
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	31
A. Bentuk Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
C. Rancangan Penelitian	31
1. Jenis Penelitian.....	32
2. Tahap Penelitian.....	32
3. Objek Penelitian.....	33
4. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV PEMBAHASAN.....	35
A. Profil Perusahaan	35
1. Sejarah Perusahaan.....	35
2. Struktur Organisasi Perusahaan	36
3. Visi dan Misi.....	39
B. Pembahasan.....	41
1. Perhitungan Anggaran Belanja	41
2. Analisis Anggaran Belanja Daerah	47
BAB V PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Varians Belanja Tahun 2010-2012	41
2. Pertumbuhan Belanja Tahun 2010-2012	42
3. Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun 2010-2012.....	44
4. Belanja Langsung dan tidak Langsung Tahun 2010-2012.....	45
5. Efisiensi Belanja	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- 1. Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2012**
- 2. Surat Permohonan Observasi**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang didasari UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sejak tahun 2001 berimplikasi pada perubahan dalam sistem pembuatan keputusan terkait dengan pengalokasian sumber daya dalam anggaran pemerintah daerah. Sebelumnya pendekatan penentuan alokasi anggaran lebih mengacu pada realisasi anggaran tahun sebelumnya dengan sedikit peningkatan tanpa merubah jenis atau pos belanja. Pendekatan atau sistem tersebut disebut sebagai sistem anggaran tradisional. Setelah otonomi daerah, tepatnya pada tahun 2003, pendekatan anggaran yang digunakan adalah anggaran berbasis kinerja.

Masalah sistem penganggaran kembali mengemukakan pada awal tahun 2000-an, ketika beberapa ketentuan yang diterbitkan pemerintah mengharuskan digunakannya sistem penganggaran berbasis kinerja. Sistem ini diajukan sebagai pengganti sistem sebelumnya, yaitu sistem penganggaran tradisional yang ditangani dengan kelemahan, dan berimbas pada praktik penganggaran yang boros dan korup.

Usulan anggaran sering kali menjadi isu penting yang menjadi sorotan masyarakat, sebenarnya organisasi sektor publik tentunya berkeinginan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, tetapi sering kali keinginan

tersebut terhambat oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Di sinilah fungsi dan peran penting anggaran.

Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang terbatas. Anggaran dapat juga dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam kurun finansial.

Dalam ruang lingkup akuntansi, anggaran berada dalam lingkup akuntansi manajemen. Beberapa fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik adalah, anggaran sebagai alat perencanaan, anggaran sebagai alat pengendalian, anggaran sebagai alat kebijakan, anggaran sebagai alat politik, anggaran sebagai alat penilaian kinerja, anggaran sebagai alat motivasi.

Anggaran publik selalu dikaitkan dengan akuntabilitas eksekutif organisasi. Konflik yang terjadi dalam penentuan anggaran sangatlah berpengaruh terhadap kapabilitas eksekutif organisasi untuk mengendalikan pengeluaran. Pada prakteknya, pihak eksekutif akan menggunakan daftar tahunan tentang pengeluaran dan pendapatan beserta tujuan aktivitasnya. Jadi, karakter anggaran adalah keseragaman, keseluruhan transaksi organisasi, keteraturan penyerahan rancangan anggaran per tahunnya, akurasi prakiraan pendapatan serta pengeluaran yang didasari oleh persetujuan/ konsensus, dan terpublikasi. Proses penyusunan maupun pengesahan anggaran dapat dipublikasikan ke masyarakat. Tujuan anggaran dapat dirumuskan sebagai alat akuntabilitas, alat manajemen, dan instrumen kebijakan ekonomi. Proses akhir penyusunan anggaran merupakan hasil

persetujuan politik, termasuk item pengeluaran yang harus disetujui para legislator.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk anggaran kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan keuangan secara bersamaan. Dalam penyusunan laporan realisasi anggaran pun tidak terlepas dari prosedur yang sudah ditentukan dalam undang-undang yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat dan bagian penatausahaan dalam pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Penatausahaan adalah tempat pencairan dana anggaran yang akan digunakan sesuai dengan perencanaan sebelumnya dan setelah rencana kegiatan berjalan laporan realisasi akan dibuatkan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Dalam pelaksanaan penyusunan laporan realisasi anggaran ini, pegawai instansi memerlukan kelengkapan data pembelanjaan langsung operasi. Dengan kelengkapan data inilah, pegawai instansi yang sudah bertanggung jawab dalam penyusunan laporan realisasi anggaran akan menjalankan penyusunan dengan baik dan lancar agar tercapai sasaran yang ditentukan. Laporan realisasi anggaran dibuatkan sebagai salah satu cara untuk mengevaluasi dan mengendalikan pembelanjaan langsung operasi yang terjadi pada pemerintahan Provinsi Sumatera Barat untuk digunakan kepada masyarakat. Oleh demikian untuk memenuhi pelayanan Pemerintah kepada Publik akan terpenuhi, maka pemerintah membuatkan Laporan Realisasi Anggaran untuk diketahui berapa dana yang akan

dianggarkan dan berapa anggaran akan direalisasikan, untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat.

Pertanggungjawaban pemerintah kepada publik yang bersih merupakan tuntunan yang harus dipenuhi oleh pemerintah, dimana untuk mewujudkannya memerlukan media tertentu. Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu yang digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan akurat dengan anggaran menilai kondisi dan hasil operasional, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainya serta membantu mengevaluasi tingkat efesien dan efektifitas.

Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kehutanan merupakan komponen penting yang mengundang perhatian publik. Hal itu disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efesien, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Belanja daerah tersebut juga mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dan arah pembangunan daerah.

Berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran, pembaca laporan keuangan dapat membuat analisis belanja daerah untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efesien, dan efektif. Untuk menganalisis anggaran khususnya analisis belanja daerah yang menggunakan analisis rasio keuangan terhadap laporan perhitungan belanja, dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain berupa: 1) Analisis Varians Belanja yaitu analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan

anggaran, 2) Analisis Pertumbuhan Belanja yaitu untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. 3) Analisis Keserasian Belanja yaitu untuk mengetahui keseimbangan antar belanja, 4) Rasio Efisiensi Belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja, digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Rasio ini menunjukkan produktifitas dan efektivitas belanja daerah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan menulis masalah tersebut dalam bentuk tugas akhir dengan judul “ **Analisis Pengukuran Kinerja Belanja Pada Laporan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.**”

B. Perumusan Masalah

Dari pendahuluan yang dikemukakan diatas tadi, maka masalah pokok yang timbul dari penelitian ini adalah “Pengukuran dan Analisis Kinerja Belanja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat ditinjau dari rasio 1). Analisis varians belanja, 2) analisis pertumbuhan belanja, 3) analisis keserasian belanja, 4) rasio efisiensi belanja”?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang di ajukan, maka tujuan dilakukan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami tentang analisis perbandingan antara anggaran dan realisasi Laporan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja realisasi anggaran belanja pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat ditinjau dari rasio belanja daerah tahun 2010-2012?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Peneliti

- a. Dapat menambah pengetahuan serta wawasan yang berkaitan dengan analisis Laporan Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

2. Bagi pihak yang diteliti (Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat)

- a. Bagi pemerintahan daerah, dapat memberikan sumbangan terhadap badan atau dinas yang terkait, khususnya yang berhubungan dengan analisis Laporan Realisasi anggaran.
- b. Diharapkan Tugas Akhir ini dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menganalisa masalah yang timbul terhadap Analisis Laporan Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
- c. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kerangka pikir peneliti dan dapat dijadikan referensi untuk para peneliti-peneliti selanjutnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

M. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan:

1. Kinerja belanja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dilihat dari analisis efisiensi secara umum kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dapat dikatakan baik karena dari tahun 2010-2012 realisasi belanja tidak ada yang melebihi yang dianggarkan dimana dari tahun 2010-2012 memiliki rata-rata sebesar 86%.
2. Pertumbuhan belanja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menunjukkan pertumbuhan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
3. Sebagian besar belanja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dialokasikan untuk belanja operasi yaitu sebesar dengan rasio 0.953.

N. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut;

1. Bagi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Dinas Kehutanan diharapkan dapat lebih mampu dan selektif dalam penyusunan rencana kerja serta pengeluaran kas untuk belanja agar tercipta keefektifan dan keefesienan yang memadai di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah tahun penelitian, agar analisis terhadap kinerja anggaran belanja mendapatkan gambar kinerja yang jelas. Dan juga disarankan untuk menambah rasio-rasio yang dapat digunakan dalam menganalisis kinerja anggaran belanja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah: Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Bastian, Indra, 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Bastian Indra, 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta:BPFE
- Mahmudi.2010.*Manajemen Keuangan Daerah*.Jakarta:Erlangga
- Mahmudi.2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.Jakarta:UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta:Andi
- Nordiawan, Deddy, 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta:Salemba Empat
- Nazir, Moh, 2009. *Metode Penelitian*:Jakarta Selatan: Ghalia Indonesia
- Yusuf, A Muri. 2005.*Metode Penelitian*. Padang: UNP Press
- Republik Indonesia, ,Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999 tentang *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- _____,Permendagri Nomo 4 Tahun 2008 tentang *Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*
- _____,Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*
- _____, Pemendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang *Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*